

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Boedi Harsono, 2007, *PPAT Sejarah, Tugas dan Kewenangannya*, Renvoi, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

Philipus M. Hardjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, sebuah studi tentang prinsip-prinsip penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi*. Peradaban, Surabaya.

Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Indro Hartono, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayu Media Publishing, Jawa Timur..

Komar Andasmita, 1981, *Notaris I*. Sumur, Bandung.

Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

- Muhammad Ridwan, 2010, *Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Telah Bersertipikat*, Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Mustafa, 2010, *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Otje Salman dan Anton F Susanto, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta.
- Peranginangin, Effendi. 2007. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta : Rajawali Press
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1986, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Prajudi Admosudirjo, 2001, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Samun Ismaya. 2018, *Hukum Administrasi Pertanahan Edisi 2*, Suluh Media, Yogyakarta.
- Shant Dellyana, 1998, *Konsep Penegakkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Urip Santoso, 2010., *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia.*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hatta Isnaini Wahyu, 2020, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Kencana, Jakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta..

Yudhi Setiawan, dkk, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan, Teori dan Praktek*, Rajawali Press Depok.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Induktif dan Deduktif dalam Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta..

B. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 20/G/2020/PTUN/PBR

C. Jurnal/Tesis

Dedek Astani. *Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Padang*. Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang. 2020.

I Made Pria Dharsana, “*Menjaga Prinsip Kehati-hatian dan Perlindungan PPAT Dalam Pelaksanaan Jabatan*”, diakses dari <https://notarymagazine.com/Omenjaga-prinsip-kehati-hatian-danperlindungan-ppat-dalam-pelaksanaan-jabatan/>

Nanda Narendra Putra, “*BPN : Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Terbentuk Tahun Ini*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5991571697d49/bpn--majelis-pembina-dan-pengawas-ppat-terbentuk-tahun-ini/>,

Silvia Septriana, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang*, Jurnal, Volume 3, Issue 4, Juni 2021.

Teguh Imam Santoso, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Kepala Kantor Pertanahan di Kota Bandar Lampung*. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/view/191> diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

Terry Maharani Wibowo, *Pembinaan dan Pengawasan Kepala Kantor Pertanahan*, Justitia Jurnal Hukum VOL: II, No.2, 2018.

Triyono. 2019. "*Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dan Implikasi Hukumnya Bagi Masyarakat Umum*", Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol.17 (2), hal. 177-179

Yuslim. *Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas. Padang. 2014.

Zefanya Helena Rosnatalia Makaampoh, "*Kajian Yuridis Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Hukuman di Bawah 5 (lima) Tahun*". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2019.

D. Website Internet

<https://kbbi.web.id/peran>(terakhir dikunjungi pada 6 Juni 2022.)